



Digitalisasi dan Pembangunan Sosial: Perspektif Sosiologi terhadap Transformasi Masyarakat di Era Teknologi

Willia Novi Aryani^{1*}, Adelia Irma Artika², Agi Bara Firdaus³, Ahmad jazily⁴, Andriilia Agustin⁵, Dimas Retyo Alfaozi⁶, Gabriel Al fathurrazaq Rusdi⁷, Sindi Fitri Maulidia⁸, Sylfiana Hidayatun Nikmah⁹, Tubagus Satria Jaya¹⁰, Wahidah Zahra¹¹

¹⁻¹¹Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: willia@radenintan.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the role of digitalization in driving social development in Indonesia through the perspective of development sociology. Digitalization has become a major force transforming social structures, values, and interaction patterns in societies worldwide. The results show that digital technology contributes significantly to increased social participation, economic empowerment, and equitable access to information. However, on the other hand, challenges arise in the form of a digital divide between urban and rural communities that can deepen social inequality. In the context of development sociology, digitalization is not only viewed as a technological process, but also as a social phenomenon that influences the dynamics of community life. Therefore, digital-based development must be directed inclusively so that all levels of society receive equal benefits. The government, educational institutions, and the community need to synergize in strengthening digital literacy and maintaining socio-cultural values amidst the current of technological globalization. With a fair and participatory approach, digitalization can be an important means of strengthening social solidarity and realizing shared prosperity.*

Keywords: *Community Empowerment; Digitalization; Development Sociology; Digital Divide; Social Development.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam mendorong pembangunan sosial di Indonesia melalui perspektif sosiologi pembangunan. Digitalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mengubah struktur sosial, nilai, dan pola interaksi masyarakat di seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan akses informasi. Namun, di sisi lain, muncul tantangan berupa kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan yang dapat memperdalam ketimpangan sosial. Dalam konteks sosiologi pembangunan, digitalisasi tidak hanya dilihat sebagai proses teknologis, akan tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berbasis digital harus diarahkan secara inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setara. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bersinergi dalam memperkuat literasi digital serta mempertahankan nilai-nilai sosial budaya di tengah arus globalisasi teknologi. Dengan pendekatan yang adil dan partisipatif, digitalisasi dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kata kunci: Digitalisasi; Kesenjangan Digital; Pembangunan Sosial; Pemberdayaan Masyarakat; Sosiologi Pembangunan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam hampir seluruh aspek kehidupan sosial. Internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan sistem informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas manusia. Dalam konteks pembangunan sosial, digitalisasi menghadirkan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas akses informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, perubahan ini juga memunculkan tantangan baru yang harus dianalisis secara kritis dari perspektif sosiologi.

Transformasi digital tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membentuk struktur sosial baru. Masyarakat kini hidup dalam ruang sosial virtual di mana identitas, interaksi, dan kekuasaan mengalami redefinisi (Aan Setiadarma, Ahmad Zaki Abdullah, Priyono Sadjijo 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting bagi sosiologi pembangunan: sejauh mana digitalisasi berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, dan bagaimana dampaknya terhadap kesenjangan sosial yang sudah ada? Di Indonesia, proses digitalisasi berjalan sangat cepat dalam dua dekade terakhir. Pemerintah mendorong program digital economy, smart city, dan e-government sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Masyarakat pun semakin bergantung pada teknologi digital untuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga kegiatan sosial. Akan tetapi, laju digitalisasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan menimbulkan kesenjangan baru yang dikenal sebagai digital divide atau kesenjangan digital.

Kesenjangan digital ini menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi. Kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat, dan wilayah terpencil seringkali tertinggal dalam arus transformasi digital. Hal ini menimbulkan persoalan sosial baru yang perlu dipahami dalam kerangka sosiologi pembangunan, karena pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga pemerataan akses dan keadilan sosial. Dari perspektif sosiologis, pembangunan tidak bisa hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi atau peningkatan infrastruktur, melainkan juga sebagai proses perubahan sosial yang kompleks (Yusuf Adam Hilman, Muhammad Choirul Basrun Umanialo 2024). Dalam konteks digitalisasi, pembangunan sosial mencakup upaya membangun kapasitas manusia, memperkuat relasi sosial, dan memastikan teknologi digunakan untuk memperluas kesejahteraan bersama, bukan memperdalam ketimpangan.

Digitalisasi juga mengubah dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Platform digital memungkinkan warga berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Fenomena seperti digital activism dan e-participation menjadi wujud baru dari demokratisasi sosial di era teknologi (Yulianti, Ningsih, and Apriawan 2025). Namun, partisipasi ini juga menghadapi tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan dominasi kelompok tertentu dalam ruang digital. Dari sisi ekonomi sosial, munculnya ekonomi digital menciptakan peluang kerja baru seperti freelancer, content creator, dan pelaku UMKM berbasis daring. Sosiologi pembangunan melihat ini sebagai bentuk transformasi struktur kelas dan pekerjaan di masyarakat. Namun di sisi lain, ketidakpastian pekerjaan digital dan

minimnya perlindungan sosial menjadi isu baru yang perlu direspons secara serius oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain aspek ekonomi, digitalisasi juga mempengaruhi nilai, norma, dan budaya sosial. Perubahan perilaku masyarakat terhadap waktu, relasi sosial, dan privasi mencerminkan munculnya tatanan sosial baru yang disebut masyarakat digital (Wulan Ayu Rahmadhani, David King, Embarina Melviyanti Br Ginting, Fernandes Diego Sijabat, Rahmad Raviqy 2022). Dalam tatanan ini, batas antara ruang publik dan privat semakin kabur, dan interaksi sosial bergeser dari tatap muka menjadi berbasis layar. Hal ini menuntut adaptasi sosial yang signifikan agar masyarakat tidak kehilangan nilai-nilai sosialnya. Sosiologi pembangunan memandang bahwa perubahan sosial akibat digitalisasi tidak bersifat netral. Teknologi membawa nilai, kepentingan, dan struktur kekuasaan tertentu (Wijaya et al. 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proses digitalisasi pembangunan. Analisis kritis ini membantu memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menjadi alat untuk kesejahteraan sosial, bukan sekadar instrumen kapitalisme baru.

Pembangunan sosial berbasis digital memerlukan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pemerataan. Peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas masyarakat lokal, dan penyediaan infrastruktur yang adil merupakan langkah penting agar setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan digital (Syaifurrohman 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari sosiologi pembangunan. Selain itu, peran lembaga pendidikan dan organisasi sosial menjadi krusial dalam membentuk masyarakat digital yang berdaya. Pendidikan sosiologis perlu menanamkan kesadaran kritis terhadap dampak sosial teknologi serta menumbuhkan etika digital yang berkeadaban. Pembangunan sosial di era digital bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat solidaritas sosial dan memperluas kesempatan hidup layak bagi semua (Sodik Dwi Purnomo, Bagus Adhitya 2021).

Dengan demikian, digitalisasi merupakan fenomena sosial yang memerlukan analisis mendalam dalam kerangka sosiologi pembangunan. Ia bukan sekadar proses teknologis, tetapi transformasi sosial yang mengubah struktur, nilai, dan hubungan antarmanusia. Melalui perspektif sosiologi, pembangunan sosial di era teknologi dapat diarahkan agar tidak hanya menciptakan kemajuan material, tetapi juga membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial (Setya et al. 2022).

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap dinamika pembangunan sosial di Indonesia, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi

digital, mengkaji digitalisasi dari perspektif sosiologi pembangunan dalam melihat dampaknya terhadap struktur dan relasi sosial masyarakat, dan mengkaji digitalisasi dari perspektif sosiologi pembangunan dalam melihat dampaknya terhadap struktur dan relasi sosial masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Teori Modernisasi dan Pembangunan Sosial

Teori modernisasi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi merupakan faktor penting dalam proses pembangunan sosial. Menurut Rostow (1960), kemajuan teknologi mampu mendorong masyarakat menuju tahap “tinggal landas” menuju kesejahteraan. Namun, dalam konteks sosiologi pembangunan, modernisasi juga menimbulkan dampak sosial seperti ketimpangan, perubahan nilai, dan disorganisasi sosial. Digitalisasi merupakan bentuk baru dari modernisasi yang mempercepat transformasi sosial, tetapi tetap harus dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan ketimpangan struktural.

Teori Ketergantungan dan Ketimpangan Digital

Teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank (1969) berpendapat bahwa pembangunan global sering menciptakan ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam era digital, ketimpangan ini muncul dalam bentuk digital divide yaitu perbedaan akses dan kemampuan menggunakan teknologi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu netral, melainkan dapat memperkuat ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan.

Sosiologi Pembangunan dan Transformasi Sosial

Menurut Soetomo (2012), pembangunan sosial merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Sosiologi pembangunan memandang bahwa transformasi sosial harus mempertimbangkan aspek nilai, norma, dan struktur sosial yang ada. Digitalisasi sebagai agen perubahan sosial mengharuskan adanya adaptasi sosial agar masyarakat mampu mengikuti perubahan tanpa kehilangan identitas dan solidaritas sosialnya.

Teori Teknologi dan Perubahan Sosial

Teori teknologi sosial (technological determinism) yang diperkenalkan oleh Marshall McLuhan (1964) menegaskan bahwa media dan teknologi membentuk cara berpikir serta pola interaksi manusia. Dalam konteks pembangunan sosial, teknologi digital menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas, tetapi juga berpotensi menimbulkan disrupsi sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hubungan antara teknologi

dan masyarakat menjadi penting untuk mengarahkan digitalisasi agar sejalan dengan tujuan pembangunan sosial yang berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terkait dampak digitalisasi terhadap pembangunan sosial dari sudut pandang masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema digitalisasi, pembangunan sosial, serta teori-teori sosiologi pembangunan.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Peneliti menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan teori-teori sosiologi seperti teori modernisasi, ketergantungan, dan perubahan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana digitalisasi membentuk dinamika pembangunan sosial di Indonesia serta menawarkan kerangka sosiologis dalam menghadapi tantangan era teknologi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi sebagai Pendorong Perubahan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi seperti internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah pola interaksi manusia secara signifikan. Interaksi sosial kini tidak lagi bergantung pada kedekatan fisik, melainkan pada keterhubungan digital yang melintasi batas geografis. Akibatnya, masyarakat mengalami pergeseran nilai, pola komunikasi, dan cara pandang terhadap kehidupan sosial yang lebih modern dan terbuka terhadap inovasi (Sarvianto 2020).

Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa digitalisasi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan. Melalui teknologi digital, akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan informasi ekonomi menjadi lebih merata. Munculnya sistem pembelajaran daring, transaksi digital, dan layanan e-government menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari perspektif sosiologi pembangunan, hal ini merupakan wujud nyata dari perubahan struktural yang memperluas kesempatan sosial bagi berbagai lapisan masyarakat (Rahmaddani and Fahmi 2025).

Selanjutnya, digitalisasi juga memperkuat partisipasi sosial dan politik masyarakat. Media sosial dan ruang digital memberikan wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kritik terhadap kebijakan, serta membangun solidaritas sosial dalam isu-isu kemanusiaan. Fenomena partisipasi daring ini menandakan adanya pergeseran dari masyarakat pasif menuju masyarakat aktif yang terlibat dalam proses pembangunan. Namun, meningkatnya partisipasi ini juga diiringi oleh tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi opini publik yang memerlukan literasi digital yang kuat.

Dari sudut pandang sosiologi pembangunan, digitalisasi dapat dipahami sebagai agen perubahan sosial yang menggeser struktur masyarakat tradisional menuju masyarakat modern berbasis pengetahuan (Qalban and Negoro 2024). Transformasi ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara kemajuan teknologi dan peningkatan kapasitas sosial. Teknologi digital tidak hanya berperan sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempercepat mobilitas sosial, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat inklusivitas sosial dalam pembangunan nasional.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa digitalisasi membawa dampak sosial yang kompleks. Ketimpangan digital masih menjadi persoalan serius, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses dan kemampuan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan sosial di era digital harus diimbangi dengan kebijakan inklusif yang memperhatikan kesetaraan akses, literasi digital, dan etika bermedia (Oki Rahadianto Sutopo, Nyarwi Ahmad 2022). Dengan pendekatan sosiologis yang berkeadilan, digitalisasi dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat yang adaptif, produktif, dan berdaya di tengah arus transformasi global.

Kesenjangan Digital sebagai Tantangan Pembangunan Sosial

Hasil kajian menunjukkan bahwa di tengah pesatnya proses digitalisasi, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak. Kesenjangan digital ini mencakup tidak hanya perbedaan dalam kepemilikan perangkat dan konektivitas internet, tetapi juga dalam kemampuan literasi digital. Masyarakat perkotaan dengan infrastruktur yang lebih memadai cenderung lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru, sementara masyarakat di pedesaan masih tertinggal akibat keterbatasan jaringan dan pendidikan digital yang rendah. Ketimpangan ini menghambat pemerataan manfaat pembangunan sosial yang berbasis digital (Mericio J. Dos Reis 2025).

Dari perspektif sosiologi pembangunan, fenomena kesenjangan digital dapat dilihat sebagai bentuk baru dari ketimpangan sosial-struktural. Mereka yang memiliki akses dan kemampuan menguasai teknologi menjadi kelompok yang lebih dominan dalam ekonomi,

pendidikan, maupun politik. Sementara itu, kelompok yang terpinggirkan secara digital mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi, peluang kerja, dan partisipasi sosial. Dalam kerangka teori ketergantungan (dependency theory), kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan digital dapat memperkuat ketergantungan kelompok lemah terhadap kelompok yang lebih kuat secara ekonomi dan teknologi (Kurniawati et al. 2025).

Selain itu, kesenjangan digital juga memperlebar jurang partisipasi sosial dan ekonomi. Ketika layanan publik, pendidikan, dan aktivitas ekonomi semakin bergantung pada platform digital, mereka yang tidak memiliki akses memadai akan semakin tertinggal. Hal ini menciptakan “digital divide” yang bukan hanya bersifat teknologis, tetapi juga sosial dan kultural. Ketimpangan ini dapat menimbulkan eksklusi sosial, di mana sebagian masyarakat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan, sehingga memperlambat tercapainya keadilan sosial yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional.

Lebih jauh, kesenjangan digital mencerminkan tantangan bagi negara dan lembaga sosial dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya memperluas infrastruktur teknologi, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan kritis (Jaka Suseno, Hasan Asyhari 2025). Pendidikan digital, pelatihan keterampilan teknologi, serta penyediaan akses internet yang merata menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan ini. Pembangunan sosial yang adil tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menggunakannya secara setara.

Dengan demikian, tantangan kesenjangan digital memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih humanis dan partisipatif. Digitalisasi tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek teknologis, tetapi sebagai bagian dari upaya sosial untuk memperkuat keadilan, pemberdayaan, dan inklusivitas. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, digitalisasi justru dapat memperdalam stratifikasi sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, upaya pemerataan akses digital harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan sosial di era teknologi agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Debi S Fuadi, Ade Sadikin Akhyadi 2021).

Dampak Digitalisasi terhadap Struktur dan Nilai Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital membawa perubahan mendasar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Kehadiran teknologi digital telah mengubah pola interaksi antarindividu dan kelompok, di mana hubungan sosial kini banyak berlangsung di ruang virtual melalui media sosial dan platform komunikasi daring. Fenomena ini menandai pergeseran dari interaksi tatap muka yang bersifat personal menuju interaksi

digital yang cepat dan luas. Perubahan tersebut secara tidak langsung mengubah struktur relasi sosial, di mana kedekatan emosional dan solidaritas tradisional mulai bergeser menuju hubungan yang lebih fungsional dan berbasis kepentingan (Bagaskara Nur Rochmansyah, Rega Slamet Riyadi, Ida Farida, Muhamad Zaenal Asikin 2022).

Dalam konteks nilai dan norma sosial, digitalisasi telah melahirkan sistem nilai baru yang lebih dinamis dan global. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan mulai mengalami reinterpretasi dalam bentuk kolaborasi digital dan solidaritas virtual. Misalnya, semangat gotong royong kini diwujudkan melalui kegiatan penggalangan dana daring, petisi sosial, dan kolaborasi berbasis komunitas digital. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan berupa melemahnya ikatan sosial tradisional yang selama ini menjadi fondasi kohesi sosial masyarakat Indonesia.

Dari perspektif sosiologi pembangunan, pergeseran nilai akibat digitalisasi merupakan bagian dari proses modernisasi sosial. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kemajuan teknologi, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir, gaya hidup, serta orientasi masyarakat terhadap nilai-nilai material dan individualistik. Jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai moral dan budaya lokal, proses ini dapat menimbulkan disorientasi sosial dan melemahkan identitas kolektif bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis agar kemajuan teknologi tidak berujung pada disintegrasi sosial (Aziz 2025).

Selain itu, struktur sosial masyarakat juga mengalami redefinisi peran dan status sosial. Individu dengan kemampuan menguasai teknologi digital cenderung memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses atau kompetensi digital. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial baru yang berbasis pada penguasaan informasi dan teknologi. Dalam konteks pembangunan sosial, hal ini menuntut kebijakan yang mampu mengarahkan transformasi digital agar tidak memperdalam kesenjangan sosial, tetapi justru memperkuat keadilan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari perubahan nilai dan struktur sosial yang menyertainya. Teknologi memang memperluas ruang interaksi dan membuka peluang baru dalam pembangunan, tetapi juga menantang eksistensi nilai-nilai sosial tradisional (Amilia Lestari 2023). Upaya mempertahankan dan mengadaptasi nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi digital menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keharmonisan sosial. Hanya dengan cara inilah digitalisasi dapat menjadi sarana pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berakar pada identitas budaya bangsa.

Digitalisasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Kehadiran teknologi digital menciptakan peluang baru bagi individu untuk mengembangkan usaha, mengakses informasi pasar, dan memperluas jaringan kerja. Platform seperti e-commerce, media sosial, serta layanan digital memungkinkan masyarakat untuk memasarkan produk, menawarkan jasa, dan membangun merek secara mandiri tanpa harus bergantung pada lembaga formal. Kondisi ini menandai pergeseran paradigma ekonomi dari sistem konvensional menuju ekonomi digital yang lebih terbuka dan partisipatif.

Selain membuka lapangan pekerjaan baru, digitalisasi juga melahirkan ekonomi kreatif berbasis inovasi dan pengetahuan. Munculnya profesi baru seperti konten kreator, influencer (Alfa Salsabila 2025), desainer digital, serta pekerja lepas (freelancer) berbasis platform online memperlihatkan perubahan dalam struktur kerja modern. Model kerja yang fleksibel ini memberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan keterampilan dan kreativitasnya. Dari perspektif sosiologi pembangunan, fenomena ini mencerminkan bentuk pembangunan partisipatif yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun demikian, pemberdayaan digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan ekonomi. Kelompok dengan tingkat pendidikan rendah atau yang berada di wilayah pedesaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi (Aisyah Salsabila Artanti, Della Sari, Bayu Tri Putra 2025). Akibatnya, digitalisasi yang seharusnya menjadi sarana pemerataan kesejahteraan justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara mereka yang mampu beradaptasi dan mereka yang tertinggal secara digital.

Dalam konteks pembangunan sosial, digitalisasi perlu dipahami bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan manusia. Keberhasilan digitalisasi terletak pada sejauh mana teknologi mampu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat partisipasi sosial, dan menciptakan kesempatan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pemerintah dalam bentuk pelatihan literasi digital, dukungan terhadap UMKM berbasis digital, dan pemerataan akses internet menjadi hal yang sangat penting. Upaya ini akan memastikan bahwa digitalisasi benar-benar menjadi motor penggerak bagi pembangunan yang inklusif (Aan Setiadarma, Ahmad Zaki Abdullah, Priyono Sadjijo 2024).

Perspektif Sosiologi terhadap Arah Pembangunan di Era Digital

Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan arah pembangunan sosial di era modern. Transformasi digital telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, hingga budaya. Namun, perkembangan ini tidak dapat dipahami hanya dari sisi teknologi semata. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, digitalisasi adalah bagian dari perubahan sosial yang kompleks, di mana kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran sosial dan kebijakan yang berpihak pada keadilan. Tanpa itu, digitalisasi berpotensi memperkuat ketimpangan sosial dan memperlemah solidaritas antarwarga (Oki Rahadiano Sutopo, Nyarwi Ahmad 2022).

Dari sisi sosial, digitalisasi membawa peluang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui teknologi informasi, masyarakat dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, menyuarakan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi digital ini membuka ruang demokratisasi baru dalam pembangunan sosial. Namun, hal ini hanya akan efektif apabila seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan kemampuan yang setara dalam menggunakan teknologi. Dalam konteks ini, pemerataan literasi digital menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

Selanjutnya, sosiologi pembangunan menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dalam mengarahkan pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi digital harus sejalan dengan penguatan solidaritas sosial, etika publik, dan rasa tanggung jawab kolektif. Teknologi seharusnya tidak menjauhkan manusia dari nilai kemanusiaannya (Mericio J. Dos Reis 2025), melainkan menjadi alat untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, arah pembangunan digital idealnya tidak hanya mengejar efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Pembangunan di era digital juga menuntut perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. Pemerintah dan lembaga pembangunan perlu melihat teknologi sebagai instrumen sosial, bukan semata infrastruktur ekonomi (Kurniawati et al. 2025). Upaya digitalisasi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Hal ini meliputi pendidikan berbasis digital, pemberdayaan ekonomi kreatif, serta perlindungan terhadap dampak negatif teknologi seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan ketimpangan akses. Pendekatan sosiologis ini memastikan bahwa pembangunan tidak kehilangan arah kemanusiaannya.

Dari perspektif keadilan sosial, digitalisasi harus mampu menciptakan pemerataan kesempatan dan pemberdayaan. Pembangunan sosial modern yang berbasis teknologi harus berorientasi pada pengurangan kesenjangan digital antara kelompok kaya dan miskin, kota dan desa, terdidik dan tidak terdidik. Dalam hal ini, teori sosiologi pembangunan mengajarkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Jaka Suseno, Hasan Asyhari 2025).

Akhirnya, arah pembangunan di era digital harus berlandaskan prinsip inklusivitas, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Digitalisasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial, memperluas akses terhadap sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada manusia — bukan hanya pada teknologi akan menciptakan keseimbangan antara kemajuan material dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi kekuatan transformasi yang tidak hanya mempercepat modernisasi, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pembangunan nasional (Debi S Fuadi, Ade Sadikin Akhyadi 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Digitalisasi sebagai pendorong perubahan sosial, hasil menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat pembangunan sosial melalui kemudahan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi. Transformasi ini mengubah pola interaksi sosial menjadi lebih terbuka dan partisipatif, menandai terbentuknya masyarakat modern berbasis teknologi yang dinamis dan adaptif. Kesenjangan digital sebagai tantangan Pembangunan Sosial, hasil penelitian menegaskan bahwa kesenjangan digital menciptakan ketimpangan baru antara masyarakat kota dan desa. Akses teknologi yang tidak merata menghambat partisipasi sosial-ekonomi dan memperdalam ketimpangan struktural dalam proses pembangunan yang seharusnya inklusif.

Dampak digitalisasi terhadap struktur dan nilai sosial yang menunjukkan bahwa digitalisasi mengubah nilai, norma, dan pola hubungan sosial masyarakat. Modernisasi ini membawa efisiensi, tetapi juga menggeser nilai-nilai tradisional, sehingga diperlukan keseimbangan agar kemajuan teknologi tidak melemahkan kohesi sosial. Digitalisasi dan pemberdayaan sosial ekonomi, membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif. Namun, keberhasilan pemberdayaan ini sangat bergantung pada pemerataan akses teknologi dan peningkatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. pembangunan digital harus berlandaskan inklusivitas dan keadilan sosial.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga sejauh mana teknologi memperkuat solidaritas, kesejahteraan, dan pemerataan sosial.

Disarankan agar pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat berkolaborasi memperluas literasi digital, pemerataan akses teknologi, serta menjaga nilai sosial-budaya. Upaya ini penting agar digitalisasi benar-benar mendorong pembangunan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan segala kemudahan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Ibu Willia Novi Aryani, S.UD., M.A selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmunya yang sangat berharga selama proses penyesunan artikel ini. Tidak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat seperjuangan yang telah berkerjasama, memberikan dukungan, serta motivasi yang tak ternilai, baik dalam proses penelitian maupun kepenulisan. Semoga segala bantuan, ilmu, dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Setiadarma, Abdullah, A. Z., Sadjijo, P., & Firmansyah, D. (2024). Tinjauan literatur transformasi sosial dalam era virtual. *Aan. Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 232–244.
- Artanti, A. S., Sari, D., Putra, B. T., & Pratama, C. A. (2025). Analisis perkembangan ekonomi digital pada perekonomian masyarakat di Indonesia. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 4(1), 15–21.
- Aziz, W. D. I. (2025). Reformasi birokrasi di era digital: Optimalisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi. *Religious and Social Humanities*, 2(1), 53–59.
- Dos Reis, M. J., & Kusuma, A. J. (2025). Peran pemerintah dalam transformasi digital dan implikasinya terhadap cyber democracy di Timor Leste. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9), 7087–7096.
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic review: Strategi pemberdayaan pelaku UMKM menuju ekonomi digital melalui aksi sosial. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13.

- Hilman, Y. A., Umanialo, M. C. B., & Khoirurrosyidin. (2024). Jimpitan digital: Model inovasi sosial bagi masyarakat urban untuk meningkatkan solidaritas sosial. *Jurnal Partisipatoris*, 6(1), 34–40.
- Kurniawati, S. B., Widodo, Z. D., Lusia, A., Zulfa, T., Alamshah, A., Nur, N., & Fatika, R. (2025). Digitalisasi UMKM melalui pelatihan pengelolaan produk berbasis website, pemasaran media sosial, dan pemanfaatan Shopee sebagai e-commerce partner digitization. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3), 582–590.
- Lestari, A. (2023). Digitalisasi sebagai kebudayaan baru terhadap pembangunan pedesaan. *Socio Religia*, 4(1), 1–9.
- Nasution, S. F. A. (2021). Optimalisasi pendidikan politik melalui literasi digital bagi penyandang disabilitas dalam Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 5(1), 68–78.
- Purnomo, S. D., Adhitya, B., & Zumaeroh. (2021). Pengaruh ekonomi digital terhadap pendapatan industri mikro dan kecil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(1), 85–95.
- Qalban, A., & Negoro, S. (2024). Implementasi pelayanan sosial berbasis digital terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di lembaga rehabilitasi sosial. *Indonesian Community Development Journal*, 5(1), 41–50.
- Rahmaddani, I., & Fahmi, R. (2025). Komunitarianisme dan digitalisasi: Peran Gen Z dalam membangun hubungan sosial di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 13–26.
- Rahmadhani, W. A., King, D., Br Ginting, E. M., Sijabat, F. D., Raviqy, R., & Amin, M. (2022). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan transparansi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan pemanfaatan digitalisasi pada pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 1167–1182. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2979>
- Rochmansyah, B. N., Riyadi, R. S., Farida, I., Asikin, M. Z., & Mijoyo. (2022). Upaya peningkatan digitalisasi pelayanan desa dan usaha mikro kecil menengah di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 4(5), 1376–1390.
- Salsabila, A., & Anshori, I. (2025). Dampak digitalisasi dan media sosial terhadap interaksi sosial di masyarakat. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 5(2), 1873–1880.
- Sarvianto, D. F. (2020). Dilema dwifungsi pemanfaatan informasi dalam pembentukan ketimpangan sosial baru di Indonesia (Telaah sosiologi digital melalui perspektif interaksionisme simbolik). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 493–509.
- Setya, F., Sri, I., Zahra, M., Kristian, M., Jasmina, Z., Program Studi, & Administrasi Pembangunan. (2022). Digitalisasi pemerataan bantuan sosial dengan inovasi “My Nutera” di Kelurahan Tamansari Bandung. *Mengabdi – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 55–62.

- Suseno, J., Asyhari, H., & Saputra, M. A. (2025). Dampak digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(1), 432–438.
- Sutopo, O. R., Ahmad, N., & Putri, R. D. (2022). Generasi muda, kapital digital dan kesenjangan sosial di era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 473–489.
- Wijaya, B. N., Glorino, M., Pandin, R., Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Fakultas Humaniora, & Universitas Airlangga. (2021). Resensi perspektif ilmu-ilmu sosial di era digital: Disrupsi, emansipasi, dan rekognisi. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(1), 94–100.
- Yulianti, H., Ningsih, D. P., & Apriawan, A. (2025). Transformasi sosial dalam konteks urbanisasi dan modernisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 3488–3500.